



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

# Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUJAKIR

Jabatan : LURAH SUNGAI SIRING

3. NHK : **282281** 

#### II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 400.000.000

 Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 350.000.000

# B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

p. 46.500**.000** 

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
- 2. MOTOR, HONDA SCOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- 3. MOBIL, SUZUKI MOBIL PENUMPANG/JEEP Tahun 1996, LAINNYA Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	CALL VE
Sub Total	Rp.	465.500.000
III. HUTANG	Rp.	189.131 <mark>.9</mark> 19
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	276.368.081

### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG EKSEKUTIF** 

**LEMBAGA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA** 

**UNIT KERJA KECAMATAN** 

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SULAEMAN

: SEKRETARIS KELURAHAN SUNGAI SIRING Jabatan

842287 3. NHK

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	The Man
В.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
PK	1. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) MT Tahun 201 SENDIRI Rp. 6.000.000	11, HAS <mark>IL</mark>	Cor. Kok
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	China Maria
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000
OK F	HARTA LAINNYA	Rp.	OK WAL
	Sub Total	Rp.	6.020.000
III. HUT	ANG	Rp.	140.976.000
IV.TOT	AL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-134.956.000

#### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





# **PENGUMUMAN** LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

# Status Verifikasi Administratif Lengkap

**EKSEKUTIF BIDANG** 

**LEMBAGA** PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

**UNIT KERJA** : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSRIANSYAH

: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Jabatan

KELURAHAN SUNGAI SIRING

3. NHK : 835509

### II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

360.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

## **ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

100.000.000

MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	6.000.000
D.	SURAT BERHARGA	- No.	OK-	Rp.	ok of
E.	KAS DAN SETARA KAS			Rp.	2.700.000
F.	HARTA LAINNYA	al.	al.	Rp.	all all
	Sub Total	KPI	W.C.	Rp.	468.700.000
III. HU	TANG			Rp.	100.000.000
IV. TO	TAL H <mark>a</mark> rta Keka <mark>y</mark> aan (II-III)	KPK-	KPIK.	Rp.	368.700 <mark>.0</mark> 00

## Catatan:

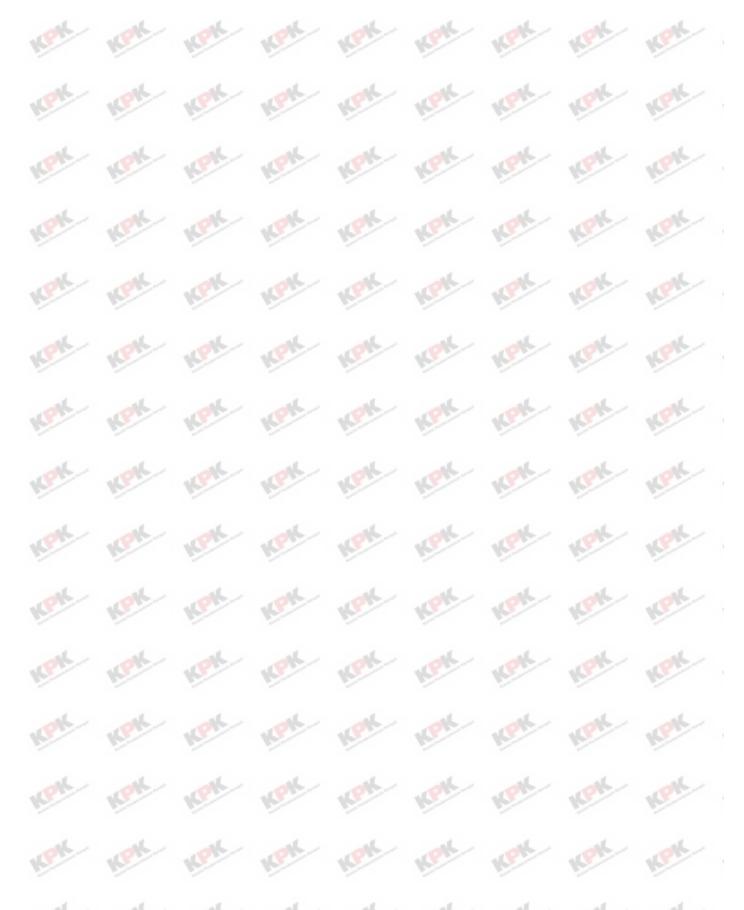
<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik





Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURNAMA SARI

2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN SUNGAI SIRING

3. NHK : 438289

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ---

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 229.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210,000,000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	at at
D.	SURAT BERHARGA	Rp	Kar Kar
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp	1.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp	KPH KPH
	Sub Total	Rp	230.000.000
HU	TANG	Rp.	273.000.000
TO	ΓAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-43.000.000

### Catatan:

III.

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

